MATERI REGULASI

Merger BPR & BPRS (lama)

POJK | Nomor 21/POJK.03/2019 | Tahun 2019

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan BPR dan BPRS

✕ Tidak berlaku

Status diperiksa 17 November 2026



STATUS

Aturan ini sudah tidak berlaku

Dulu mengatur penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan BPR dan BPRS.

× DICABUT

Tidak berlaku. Dicabut POJK 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPR Syariah, berlaku 30 April 2024.

ATURAN YANG SEKARANG DIPAKAI

POJK 7/2024

Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Buka sumber resmi

SETELAH DICABUT

Apa yang berubah di aturan pengganti

1 Lembaga keuangan mikro kini boleh ikut bergabung (merger) dengan BPR atau BPR Syariah, dengan syarat tertentu.

Sumber: ojk.go.id

2 OJK berwenang memerintahkan BPR/BPR Syariah melakukan atau menerima penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan.

Sumber: ojk.go.id

3 BPR/BPR Syariah dengan pemegang saham pengendali sama dalam satu pulau wajib konsolidasi: paling lama 2 tahun (non-pemda) atau 3 tahun (pemda).

Sumber: ojk.go.id

PENUTUP

Status & sumber resmi

✕ Tidak berlaku

Tidak berlaku. Dicabut POJK 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPR Syariah, berlaku 30 April 2024.

Diperiksa 17 November 2026

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-7-Tahun-2024-Bank-Perekonomian-Rakyat-dan-Bank-Perekonomian-Rakyat-Syariah.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penggabungan,-Peleburan,-dan-Pengambilalihan-Bank-Perkreditan-Rakyat-Dan-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah.aspx

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan bantuan AI (riset); selalu cocokkan dengan naskah resmi.